

## Analisis Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Tenaga Kerja dalam Konteks *Free Flow of Services dan Skilled Labour* dalam Kerangka *ASEAN Economic Blueprint*

Arinda Milahayu Indraswari Anny  
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Korespondensi penulis: [arinda.anny@gmail.com](mailto:arinda.anny@gmail.com)\*

**Abstract.** *The Bali Concord II Declaration became the basis for the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) which aims to create a single market with five freedoms, including skilled labor mobility. However, Indonesia faces challenges in improving the quality of its human resources to compete in the regional market. Indonesia-Germany cooperation, in terms of vocational education development in Indonesia, offers a strategic opportunity to produce competent graduates according to international standards. Policy support such as Presidential Regulation No. 68 of 2022 on the revitalization of vocational education strengthens this effort, enabling technology transfer, strengthening industry-based curriculum, and improving the quality of teaching staff. Effective implementation is expected to make Indonesia one of the leading countries in skilled labor exports in ASEAN, while strengthening national economic competitiveness in the era of regional integration.*

**Keywords:** *ASEAN Economic Community Blueprint, Indonesia-Germany Cooperation, Vocational Education, High-skilled Labor*

**Abstrak.** Deklarasi Bali Concord II menjadi dasar pembentukan ASEAN *Economic Community (AEC)* yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dengan lima kebebasan, termasuk mobilitas tenaga kerja terampil. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bersaing di pasar regional. Kerja sama Indonesia-Jerman, dalam hal pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia, menawarkan peluang strategis untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai standar internasional. Dukungan kebijakan seperti Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi memperkuat upaya ini, memungkinkan transfer teknologi, penguatan kurikulum berbasis industri, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Implementasi yang efektif diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara unggulan dalam ekspor tenaga kerja terampil di ASEAN, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di era integrasi regional.

**Kata Kunci:** ASEAN Economic Community Blueprint, Kerja Sama Indonesia-Jerman, Pendidikan Vokasi, Tenaga Kerja Terampil

### 1. PENDAHULUAN

Deklarasi Bali Concord II yang diresmikan pada 7 Oktober 2003 oleh ASEAN menjadi tonggak penting dalam membentuk Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), yang didasarkan pada tiga pilar utama: kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, serta sosial budaya. Salah satu wujud konkret dari pilar ekonomi ini adalah diadopsinya konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) melalui ASEAN Economic Community Blueprint (AECB) 2025. Blueprint ini menjadi panduan utama dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan, dengan target menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang terintegrasi dan basis produksi bersama (ASEAN, 2015).

Konsep AEC bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui mekanisme *Single Market and Production Base* yang didukung oleh lima kebebasan utama: kebebasan aliran barang (*Free Flow of Goods*), jasa (*Free Flow of Services*), investasi (*Free Flow of Investment*), modal (*Free Flow of Capital*), dan tenaga kerja terampil (*Free Flow of Skilled Labour*) (ASEAN, 2013). Dalam konteks ini, deklarasi AECB menegaskan komitmen ASEAN untuk mengakomodasi kebebasan-kebebasan tersebut, sehingga tenaga kerja terampil memiliki peluang lebih besar untuk mobilitas di seluruh negara anggota.

Melalui deklarasi AECB, Para pemimpin negara-negara ASEAN telah merencanakan pelaksanaan liberalisasi tenaga kerja terampil, yang memungkinkan warga negara untuk berpindah antar negara anggota ASEAN guna mencari pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara tujuan. Untuk mengimplementasikan liberalisasi tenaga kerja terampil di ASEAN, negara-negara anggota telah *menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. MRA adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar saling pengakuan kualifikasi profesional di antara komunitas ASEAN. Melalui MRA, kompetensi tenaga kerja profesional di ASEAN diakui secara bersama, Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil di antara negara-negara anggotanya. Saat ini terdapat 8 profesi yang dicakup dalam MRA, yaitu insinyur, arsitek, dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, tenaga pariwisata, dan tenaga surveyor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).

Sebagai bagian dari AEC, Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam kerangka *single market and production base*. Sayangnya, hingga saat ini, tenaga kerja Indonesia masih kesulitan untuk bersaing di dunia global. Hal tersebut dibuktikan dengan tenaga kerja asal Indonesia yang mendapatkan pekerjaannya di luar negeri seringkali menjalankan pekerjaan yang bersifat *low-skill* atau *un-skill* (Heriyanto, 2019, 93) seperti di bidang pertanian, konstruksi, dan rumah tangga.

Namun, sebagai bagian dari AEC, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bersaing di pasar tenaga kerja regional. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya proporsi tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar internasional. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya mengisi posisi yang membutuhkan keterampilan rendah (*low-skill*) atau bahkan tanpa keterampilan (*unskilled*) (Heriyanto, 2019, 93). Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AEC. Melihat kondisi ini, Indonesia harus mengembangkan kesiapan tenaga kerja terampilnya untuk dapat bersaing di dunia global, terutama ketika Indonesia merupakan negara anggota AEC. Sudah seharusnya Indonesia turut mengembangkan tenaga kerjanya

untuk dapat memenuhi kewajiban Indonesia dalam memenuhi tujuan AECB di tahun-tahun yang akan datang.

Masalah utama ini berasal dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang kompetitif, Indonesia perlu melakukan peningkatan besar-besaran pada sektor pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi harus dirancang untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan teknis, inovasi, dan pemahaman teknologi sesuai dengan kebutuhan industri. Investasi dalam fasilitas pendidikan, pembaruan kurikulum berbasis kebutuhan pasar, serta kerja sama erat antara institusi pendidikan dan sektor swasta menjadi keharusan untuk menciptakan lulusan yang siap kerja.

Untuk mengoptimalkan hasil, kurikulum pendidikan vokasi harus dikembangkan bersama sektor industri agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (Daryanto et al., 2022, 33). Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengajaran berbasis praktik, serta penguatan infrastruktur pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas lulusan. Koordinasi antarlembaga pemerintah juga perlu diperbaiki untuk memastikan tercapainya efisiensi dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendidikan vokasi ditawarkan di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan vokasi di tingkat pendidikan tinggi ditawarkan dalam 4 skema: Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), dan Diploma IV (D-IV). Di atas level D-IV, terdapat jenjang profesional, spesialis, dan subspecialis yang biasanya ditawarkan sebagai pendidikan lanjutan dari gelar Sarjana, seperti dokter medis, psikolog, notaris, dan sebagainya. Para profesional ini diwajibkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memperoleh izin praktik (Albert, 2020, 51).

Dalam menghadapi era AEC, kebijakan dan implementasi pendidikan vokasi yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang sudah lebih maju dalam pengembangan SDM mereka. Dengan memanfaatkan momentum ini, tenaga kerja Indonesia diharapkan mampu bersaing dalam pasar regional yang terintegrasi, tidak hanya mengisi kebutuhan tenaga kerja domestik tetapi juga berkontribusi pada pasar tenaga kerja internasional. Jika berhasil, Indonesia dapat menjadi salah satu negara ASEAN yang unggul dalam ekspor tenaga kerja terampil, sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional..

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dan hubungannya dengan masalah yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 95)

Dalam cakupan penelitian ini, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja menuju *free flow of services and skilled labour* dalam kerangka *ASEAN ECONOMIC BLUEPRINT* dapat terpenuhi dengan meninjau dari Perjanjian Internasional, Peraturan Hukum Nasional, maupun Peraturan Hukum Internasional.

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan menyelesaikan isu-isu hukum, serta menghasilkan argumen yang relevan dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 35). Kemudian, penelitian bersifat aplikatif berarti penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 69). Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau mengenai kebijakan hukum Pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja menuju *free flow of services and skilled labour* dalam kerangka *ASEAN ECONOMIC BLUEPRINT*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Melalui deklarasi AECB, para pemimpin negara-negara ASEAN telah merumuskan rencana untuk meliberalisasi pergerakan tenaga kerja terampil. Kebijakan ini memungkinkan warga negara ASEAN berpindah antarnegara anggota guna mencari pekerjaan tanpa menghadapi hambatan di negara tujuan. AECB 2025 bertujuan untuk memfasilitasi *free flow of skilled labour* di kawasan ASEAN, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Salah satu fokus utama dari blueprint ini adalah untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja terampil antar negara anggota, sehingga para profesional dapat bekerja di negara lain dengan lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang ada dalam pergerakan tenaga kerja dan memungkinkan pekerja dengan keterampilan tertentu untuk berkontribusi secara maksimal di pasar kerja negara-negara ASEAN (ASEAN, 2015).

Untuk mendukung pelaksanaan liberalisasi ini, negara-negara anggota telah menyepakati *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, yaitu perjanjian internasional yang menjadi landasan pengakuan bersama atas kualifikasi profesional di dalam komunitas ASEAN. Melalui MRA, kompetensi tenaga kerja profesional di ASEAN diakui secara kolektif. Instrumen ini dirancang untuk mendukung mobilitas tenaga kerja terampil di antara negara-negara anggota. Saat ini, terdapat delapan profesi yang tercakup dalam MRA, yaitu insinyur, arsitek, dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, tenaga di bidang pariwisata, dan surveyor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi *free flow of skilled labour* yang ditetapkan oleh AEC. Salah satu masalah utama adalah ketidakcocokan kualifikasi tenaga kerja (Asyidiqi, 2024, 282). Meskipun telah ada kesepakatan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil, banyak pekerja Indonesia yang tidak memenuhi standar kualifikasi yang diakui di negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam sistem pendidikan dan pelatihan, yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan industri di negara tujuan. Persaingan antar negara ASEAN juga menjadi faktor penting. Negara-negara anggota lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih mendukung untuk menarik tenaga kerja terampil, sementara Indonesia masih berjuang dengan masalah internal seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan dominasi sektor informal dalam pekerjaan.

Selain mendorong mobilitas, AEC juga menaruh perhatian besar pada pengembangan pendidikan berkualitas. Pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk bersaing di tingkat global. AEC menegaskan pentingnya memperbaiki kurikulum pendidikan dan pelatihan agar selaras dengan kebutuhan industri modern (ASEAN, 2013). Melalui pendekatan ini, AEC berharap dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih kompeten, fleksibel, dan memiliki daya saing tinggi di pasar internasional (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT, 2009). Dengan demikian, Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional melalui kerjasama yang erat dengan negara-negara anggota lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja terampil yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri. Dengan demikian, AEC berharap dapat mengatasi kekurangan keterampilan yang ada dan meningkatkan daya saing ekonomi regional.

Sebagian besar tenaga kerja yang diekspor dari Indonesia masih tergolong dalam kategori berkeahlian rendah, terutama di sektor seperti konstruksi, manufaktur sederhana, dan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari Bappenas, mayoritas pekerja di sektor pertanian dan industri juga merupakan tenaga kerja berkeahlian rendah, dengan lebih dari 90% di

antaranya memiliki tingkat keterampilan yang rendah (Ekaptiningrum, 2022). Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, negara-negara tujuan utama untuk pekerja migran Indonesia meliputi Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura (Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, 2023, 35).

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih didominasi oleh kategori *low-skill*, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, layanan rumah tangga, dan pekerjaan jasa. Data dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (2023, 32) menunjukkan bahwa pada periode 2019-2022, sebanyak 30,18% pekerja migran Indonesia tergolong dalam kategori *housemaid*. Persentase ini mengindikasikan bahwa hampir separuh tenaga kerja Indonesia di luar negeri bekerja di sektor ini. Fenomena tersebut mencerminkan dominasi pekerjaan berkeahlian rendah dalam ekspor tenaga kerja dan menyoroti tantangan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia untuk beralih ke pekerjaan dengan kualifikasi lebih tinggi.

Di sisi lain, ekspor tenaga kerja terampil, yang mencakup profesional di bidang teknologi informasi, kesehatan, dan teknik, masih berada pada level yang rendah (Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, 2023, 123). Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah minimnya pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk memenuhi standar internasional. Selain itu, keterbatasan pengakuan atas kualifikasi pendidikan Indonesia di negara lain juga menjadi hambatan yang signifikan (Robi'ah & Prihantini, 2024, 418). Kondisi ini menghambat perkembangan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global, menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih sulit dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja terampilnya.

Negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura lebih unggul dalam hal kebijakan yang mendukung pergerakan tenaga kerja terampil. Singapura, misalnya, telah mengembangkan sistem pengakuan keterampilan yang efisien dan menarik banyak pekerja terampil dari negara lain (Habibah, 2024). Malaysia juga aktif dalam mempromosikan pelatihan vokasi dan program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaganya. Sementara itu, Thailand dan Filipina dikenal sebagai pengirim tenaga kerja terampil ke luar negeri, dengan Filipina menjadi salah satu negara terbesar dalam ekspor tenaga kerja ke berbagai negara (Manning, 2012, 36).

Indonesia menghadapi kesenjangan antara kapasitas tenaga kerja yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja global di kawasan ASEAN. Sebagian besar tenaga kerja yang diekspor dari Indonesia belum memenuhi kualifikasi *high-skill* yang diperlukan untuk bersaing di sektor-sektor maju, seperti teknologi informasi dan kesehatan. Ketergantungan pada tenaga

kerja low-skill membuat Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi regional, terutama dalam mobilitas tenaga kerja terampil yang menjadi salah satu fokus AEC. Padahal, *free flow of skilled labour* yang diusung dalam AEC Blueprint bertujuan untuk mempermudah profesional terampil dari Indonesia bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. (Singadimedja & Lustiany, 2019). Namun, tanpa peningkatan substansial dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, peran Indonesia dalam aliran ini terbatas.

Dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di arena global dalam pemerataan sumber Sumber Daya Manusia, ASEAN telah menciptakan sejumlah instrumen, termasuk *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* (Kesuma, 2017). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mendukung mobilitas tenaga kerja terampil di antara negara-negara anggota ASEAN serta mempermudah pengakuan keahlian dan kualifikasi profesional. Namun, penerapan *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* hingga kini masih terbatas pada sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, kesehatan, dan logistik. (Sudarmanto & Abudurahman, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan instrumen ini masih perlu diperluas agar lebih banyak sektor dapat memanfaatkan manfaat dari kesepakatan *MRAs*.

Menjelang tahun 2025, AEC menetapkan target ambisius untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di seluruh wilayah ASEAN, termasuk Indonesia. Target ini mencakup upaya untuk mendorong peningkatan tingkat keterampilan tenaga kerja dengan proyeksi kenaikan berkisar antara 0,3% hingga 1,4% (Adhisti, 2017). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja di kawasan ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sejalan dengan tuntutan industri dan perkembangan ekonomi global. Peningkatan keterampilan tenaga kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing regional serta mendorong inovasi dan produktivitas.

### **Perjanjian Kerja Sama Internasional di Bidang Pendidikan sebagai Persiapan Indonesia dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Terampil Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint**

Sebagaimana kerangka ASEAN *Economic Blueprint*, Indonesia telah mengambil langkah besar untuk mempersiapkan tenaga kerjanya untuk mendukung *Free Flow of Skilled Labour*. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah membuat kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja (Bappenas, 2022, 221). Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 menegaskan bahwa menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif sangat penting. Kebijakan ini mencakup mendorong lembaga pendidikan untuk meningkatkan kurikulum mereka untuk memenuhi tuntutan pasar kerja ASEAN dan mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Perubahan sosial dan ekonomi yang beragam di Indonesia hingga tahun 2030 harus dilihat dalam konteks regional (ASEAN) dan global. Pemberlakuan Komunitas AEC yang dimulai pada akhir tahun 2015 akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan persaingan bebas di antara masyarakat di Asia Tenggara. AEC memiliki berbagai implikasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Sebagian besar anggota ASEAN berharap bahwa AEC akan menjadi pendorong bagi ekonomi yang berbasis keterampilan tinggi, mengingat mereka telah beralih menuju produksi dan ekspor yang memerlukan keterampilan teknologi tinggi untuk mendukung produktivitas. Dengan adanya AEC, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil di kawasan ini, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Indonesia juga berfokus pada pendidikan vokasional untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di sektor-sektor kunci. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga lulusan siap untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan (Hamdani et al., 2023, 149). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan persaingan tenaga kerja di Indonesia (Putri, 2018, 29).

Kurikulum institusi vokasional ini berfokus pada praktik dan pembelajaran berbasis kompetensi yang berguna di tempat kerja (Effendi, 2024, 14). Tujuan ini selaras dengan program "*link and match*" yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang bertujuan mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan nyata dunia industri (Disas, 2018, 237). Program ini memungkinkan lembaga pendidikan menjalin kemitraan dengan berbagai sektor industri untuk merancang kurikulum, menyediakan kesempatan magang, dan mempersiapkan lulusan agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyediakan berbagai program pendidikan yang dirancang untuk membekali siswa dengan keahlian khusus dalam bidang teknologi, kesehatan, pariwisata, dan bisnis. Berdasarkan laporan UNESCO mengenai profil pendidikan vokasional di Indonesia, SMK memainkan peran penting dalam membangun keterampilan siswa yang relevan dengan sektor-sektor tersebut. Sebagian besar SMK, yakni lebih dari 80% dari total institusi, berfokus pada bidang teknologi, industri, serta manajemen bisnis. Hal ini menunjukkan komitmen SMK dalam menyesuaikan program pendidikannya dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang (UNEVOC, 2020, 6). Dengan adanya

program pendidikan vokasional ini, lulusan SMK dapat langsung bergabung dengan pasar kerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat diploma.

Pendidikan tinggi vokasional di Indonesia, yang diselenggarakan melalui institusi seperti politeknik dan akademi, dirancang secara khusus untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis serta kemampuan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Institusi-institusi ini berfokus pada pembelajaran berbasis praktik, yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di bidang mereka. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengasah keterampilan yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja nyata, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan profesional dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

Politeknik dan akademi adalah wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mencetak tenaga kerja yang tidak hanya menguasai aspek teoretis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Institusi-institusi ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis teori dengan pengalaman langsung di lapangan, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan kerja. Melalui pendekatan ini, politeknik dan akademi berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, memastikan bahwa tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap untuk menghadapi tantangan industri modern (Dalimunthe, 2023, 32). Politeknik dan akademi mengedepankan pembelajaran yang berbasis praktik dan langsung terkait dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum dirancang untuk memprioritaskan keterampilan teknis dan profesional (Akbar et al., 2023, 91).

Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendidikan vokasional tersedia mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Di tingkat pendidikan tinggi, program vokasional terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), dan Diploma IV (D-IV). Setiap tingkatan dirancang untuk memberikan keterampilan dan kemampuan yang meningkat secara bertahap, mulai dari level dasar hingga lanjutan, agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang beragam. Pendekatan berjenjang dalam KKNI memberi fleksibilitas bagi lulusan vokasional untuk menyesuaikan jalur karier mereka dengan kebutuhan industri. Selain itu, sistem ini juga membuka peluang bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang spesialisasi tertentu (Amril, 2016).

Sebagai salah satu upaya dalam menyiapkan tenaga kerja, Indonesia perlu belajar dari negara-negara maju yang telah memiliki Pendidikan Vokasi yang terqualifikasi, sehingga Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam memenuhi kerangka AECB, khususnya *free flow of skilled labour*.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama yang dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan pendidikan vokasinya, beberapa diantaranya yakni: “**Memorandum Saling Pengertian Tentang Pelatihan Kejuruan Dalam Sektor Industri**” dengan Tiongkok pada tahun 2022, kemudian “**Memorandum Saling Pengertian Tentang Kerja Sama Pelatihan Vokasi Pada Pelatihan Berbasis Kerja**” dengan Austria pada tahun 2022, juga “**Declaration of Intent on a Partnership in Vocational Education and Training**” pada tahun 2017 (BAPPENAS, 2017). Penandatanganan deklarasi tersebut menandakan bahwa Indonesia dan negara-negara yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (VET).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang menyebabkan distribusi pendidikan masih belum merata dan berkeadilan. Secara demografis, dengan status sebagai negara berpenduduk terpadat keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan berupa kekurangan tenaga pengajar, seperti guru dan dosen, khususnya di bidang pendidikan vokasi (Hartanto et al., 2019). Selain itu, penerapan sistem VET perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, termasuk pola pikir yang masih memengaruhi pandangan terhadap pendidikan vokasi (Sudira, 2012). Dukungan dan komitmen pemerintah menjadi kunci utama untuk mereformasi sistem pendidikan vokasi di tingkat nasional dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Kemitraan dengan negara-negara maju yang telah lebih siap dalam sistem pendidikannya memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem VET. Sistem VET Ganda dianggap sebagai solusi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (BIBB - Federal Institute for Vocational Education and Training). Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia dapat memanfaatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jerman, Austria, dan Tiongkok yang merupakan negara maju. Jika hal ini terwujud, guru, pelatih, siswa, dan lulusan SMK di Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara terkait, serta di Eropa secara umum. Dengan mengintegrasikan sistem VET Ganda ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, siswa dan lulusan SMK akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan standar Global, yang

mana akan membantu Indonesia untuk dapat memenuhi kerangka ASEAN *Economic Blueprint* sebagai negara anggota AEC.

Kerja sama Indonesia dalam bidang pendidikan vokasi merupakan langkah awal untuk mempelajari dan mengadaptasi sistem pendidikan vokasi ganda di Indonesia. Implementasi sistem VET Ganda yang didukung oleh kerja sama dengan Jerman dapat membantu Indonesia meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN, khususnya dalam hal ekspor tenaga kerja terampil. Berdasarkan ASEAN *Economic Community Blueprint*, terdapat komitmen untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang terintegrasi, di mana tenaga kerja terampil dari negara-negara anggota memiliki mobilitas yang lebih tinggi.

Dengan sistem VET yang lebih baik dalam adopsi yang didapatkan dari kerja sama internasional tersebut, lulusan vokasi di Indonesia dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional, termasuk standar yang berlaku di negara-negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan peluang tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar kerja regional, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian teknis dan profesional. Selain itu, keunggulan ini dapat membantu Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang telah lebih dulu memperkuat pendidikan vokasi mereka. Dengan penguatan sistem VET Ganda, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil domestik tetapi juga menjadi salah satu pemasok tenaga kerja terampil terbesar di kawasan ASEAN, mendukung posisi strategisnya dalam komunitas ekonomi regional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Pendidikan vokasional di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan daya saing di pasar global, terutama dalam konteks ASEAN *Economic Community* (AEC). Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, serta stigma negatif terhadap pendidikan vokasional, langkah-langkah revitalisasi yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di tingkat internasional.

2. Revitalisasi pendidikan vokasional di Indonesia sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam konteks AEC. Melalui berbagai kebijakan dan program kolaborasi dengan negara-negara maju, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasional dengan mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri, menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai, serta meningkatkan keterampilan tenaga pengajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lulusan pendidikan vokasional dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Saran**

1. Perlunya peningkatan kolaborasi antara institusi pendidikan vokasional dan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah harus berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan, serta mengadakan program sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan vokasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dapat diekspor ke negara-negara ASEAN lainnya.
2. Perlunya peningkatan sinergi antara lembaga pendidikan vokasional dan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan selalu relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah harus terus mendukung pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta mendorong program magang yang memberikan pengalaman praktis bagi siswa. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya akan mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai tetapi juga menciptakan inovator dan wirausahawan yang handal, sehingga dapat bersaing lebih baik di tingkat regional dan global.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhisti, M. (2017). Free movement of skilled labor within the ASEAN Economic Community. *Economic Development Analysis Journal*.
- Akbar, J. S., Dharmayanti, P. A., Nurhidayah, V. A., Lubis, S. I., Saputra, R., Sandy, W., Maulidiana, S., Setyaningrum, V., Lestari, L. P. S., Ningrum, W. W., Astuti, N. M., Nelly, Ilyas, F. S., Ramli, A., Kurniati, Y., & Yuliastuti, C. (2023). *Model & metode pembelajaran inovatif: Teori dan panduan praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Albert. (2020). A study on the vocational education in the ASEAN Economic Community (AEC) countries and its implications to Indonesia. *Economics and Business Solutions Journal*, 4(2), 51–68.
- Amril. (2016, July 3). KKNi dan kurikulum perguruan tinggi (Membangun efektivitas dan akuntabilitas). Retrieved December 17, 2024, from <https://lpm.uin-suska.ac.id/2017/01/kkni-dan-kurikulum-perguruan-tinggi-membangun-efektifitas-dan-akuntabilitas/>
- ASEAN Economic Community Blueprint. (2009). *ASEAN Economic Community Blueprint report*. ISEAS Publishing.
- ASEAN. (2007). *ASEAN Brief 2007: Progress towards the ASEAN Community*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2013). *ASEAN Community progress monitoring system full report 2012: Measuring progress towards the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint, 2025*. ASEAN Secretariat.
- Asyidiqi, H. (2024). The impact of ASEAN Economic Community on skilled labor in Indonesia: In the case of healthcare professionals. *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities*, 280–288.
- Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. (2023). *Analisis pasar kerja luar negeri tahun 2023*. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- Bappenas. (2022). *Survei rencana pengembangan sumber daya manusia di sektor infrastruktur*. Bappenas.
- BIBB - Federal Institute for Vocational Education and Training. (2019). *Vocational education and training in Europe: Germany*. Cedefop. Retrieved December 16, 2024, from <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/germany>
- Dalimunthe, F. I. (2023). Implementasi kewirausahaan sebagai perangkat pembelajaran berbasis produk pada pendidikan vokasi. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 11(1), 26–40.
- Daryanto, E., Darwin, Siregar, B., & Januariyansah, S. (n.d.). *Model manajemen pelatihan pendidikan vokasi*. UMSU Press.
- Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 231–242.
- Effendi, M. I. (2024). Studi komparasi pelatihan guru vokasi di negara Indonesia dan Jepang. *Kiryoku*, 8(1), 12–21.
- Ekaptiningrum, K. (2022, October 4). Tenaga kerja Indonesia masih didominasi low skill. Universitas Gadjah Mada. Retrieved November 6, 2024, from <https://ugm.ac.id/id/berita/23020-tenaga-kerja-indonesia-masih-didominasi-low-skill/>

- Habibah, L. N. (2024). Pengaruh ekspor intra ASEAN, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di lima negara anggota ASEAN sebelum dan saat pandemi COVID-19. *Skripsi*.
- Hamdani, Jalinus, N., Refdinal, & Ranuharja, F. (2023). Pendidikan vokasional dalam perspektif filosofi pragmatisme. *JPTIV Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Vokasional*, 5(2), 145–153.
- Hartanto, C. F. B., Rusdarti, & Abdurrahman. (2019). Tantangan pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0 dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 164–171.
- Heriyanto, A. (2019). Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kejahatan di Malaysia. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17, 93.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2018, September 25). Tenaga kerja profesional - Ketua Dewan MEA Indonesia. Retrieved November 4, 2024, from <https://meaindonesia.ekon.go.id/tenaga-kerja-profesional/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021, November 6). Kemendikbudristek dorong PTV di Indonesia buka kelas internasional. Retrieved December 17, 2024, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/kemendikbudristek-dorong-ptv-di-indonesia-buka-kelas-internasional>
- Manning, C. (2012). Perdagangan di bidang jasa dan ketenagakerjaan. *Trade and Employment Programme, International Labour Office and ILO Office for Indonesia*.
- Putri, S. Y. (2018). Upaya pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35, 19–33.
- Robi'ah, F., & Prihantini. (2024). Urgensi kualitas pendidik yang sesuai dengan kebijakan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 409–419.
- Singadimedja, H. N., & Lustiany, D. (2019). Kesesuaian free flow of skilled labour dalam ASEAN Economic Community Blueprint dengan peraturan tenaga kerja asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 245–268.
- Sudarmanto, H., & Abudurahman, S. F. (2016, January 20). Indonesia & ASEAN Economic Community: Free flow of skilled labor. *Indonesia Investments*. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-asean-economic-community-free-flow-of-skilled-labor/item6405>
- Sudira, P. (2012). Pengembangan kurikulum menuju SMK internasional. *Journal UNY*.
- UNEVOC. (2020). *TVET country profile Indonesia*. UNEVOC.